

1. Bangsa Eropa pertama yang menginjakkan kaki di Nusantara dan berusaha menguasai Nusantara adalah ...

- a. Portugis
- b. Spanyol
- c. Belanda
- d. Inggris
- e. Perancis

Pembahasan

Jawaban : a

Di bawah pimpinan Francisco Serrao, bangsa Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang menginjakkan kaki di Nusantara saat mendarat di Hitu, Kepulauan Maluku, tahun 1512.

2. Perubahan nama Jayakarta menjadi Batavia dilaksanakan VOC pada masa pemerintah Gubernur Jenderal ...

- a. Pieter Both
- b. Jansen
- c. Jan Pieterzoon Coen
- d. Daendels
- e. Laurens Reael

Pembahasan

Jawaban : c

Di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Jan Pieterzoon Coen, pada tahun 1619 VOC menyerbu Jayakarta, kemudian mengubah menjadi Batavia.

3. Sungai terpanjang di Indonesia terdapat di pulau ...

- a. Kalimantan
- b. Jawa
- c. Sumatera
- d. Sulawesi
- e. Papua

Pembahasan

Jawaban : a

Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang memiliki panjang 1.010 km. Sungai ini terletak di Provinsi Kalimantan Barat.

4. Untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat membentuk Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang diketuai oleh ...

- a. Menteri Keuangan
- b. Menteri Dalam Negeri
- c. Menteri Sekretaris Negara
- d. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
- e. Ketua BAPPENAS

Pembahasan

Jawaban : b

Sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diketuai oleh Menteri dalam Negeri, dengan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai wakilnya.

5. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh ...

- a. Presiden
- b. Menkumham
- c. Mahkamah Konstitusi
- d. Mahkamah Agung
- e. MPR

Pembahasan

Jawaban : a

Sebagaimana diatur dalam Pasal 24B Ayat 3, anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

6. Penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom disebut ...

- a. Dekonsentrasi
- b. Tugas pembantuan
- c. Tugas administrasi ganda
- d. Desentralisasi

e. Dekonsentrasi

Pembahasan

Jawaban : d

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Tipe desentralisasi yang bertujuan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menggali secara maksimal potensi sumber dana daerah adalah ...

- a. Desentralisasi fiskal
- b. Desentralisasi ekonomi
- c. Desentralisasi pendanaan
- d. Desentralisasi administrasi
- e. Desentralisasi perdagangan

Pembahasan

Jawaban : a

Desentralisasi tipe fiskal, bertujuan untuk memberikan kepada daerah untuk menggali berbagai sumber dana yang tersedia.

8. Hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan - kebijakan yang dilaksanakan pemerintah disebut ...

- a. Hak menyatakan pendapat
- b. Hak konsolidasi
- c. Hak interpelasi
- d. Hak angket
- e. Hak asasi

Pembahasan

Jawaban : d

Hak angket adalah hak yang dimiliki DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan - kebijakan yang dilaksanakan pemerintah.

9. Strategi pembangunan Indonesia diarahkan untuk membangun Indonesia di segala bidang terutama dalam hal ...

- a. Peningkatan pendapatan ekonomi negara
- b. Penciptaan generasi yang berbasis kepada pendidikan dan kebudayaan
- c. Perbaikan moralitas warga negara
- d. Pemenuhan hak dasar rakyat
- e. Pemenuhan kebutuhan belanja negara

Pembahasan

Jawaban : d

Strategi Pembangunan Indonesia diarahkan untuk membangun Indonesia di segala bidang terutama dalam pemenuhan hak dasar rakyat sebagai landasan penciptaan pembangunan yang kokoh.

10. Hak anggota DPR untuk mengajukan usul Rancangan Undang - Undang diatur dalam UUD 1945 Pasal ...

- a. 13
- b. 23B
- c. 21
- d. 29
- e. 24

Pembahasan

Jawaban : c

Isi UUD 1945 untuk:

- o Pasal 13: berisi tentang hak presiden dalam pengangkatan duta negara dan konsul.
- o Pasal 23 B: Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang - undang.
- o Pasal 21: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak untuk mengajukan usul rancangan Undang - undang.
- o Pasal 29: Mengatur tentang kebebasan beragama.
- o Pasal 24: Mengatur tentang kekuasaan Kehakiman.